

PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM PEMENUHAN HAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU DARI TEORI KEMANFAATAN HUKUM

Fajar Kurniawan

Magister Ilmu Hukum

Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., LL.M.

ABSTRAK

Dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan dari korban kekerasan seksual yang sangat menyeluruh, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *Jo* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban telah mampu memenuhi Hak Korban Kekerasan Seksual dengan ditinjau dari teori kemanfaatan hukum. Selain itu yang ingin diketahui dalam penelitian ini ialah bagaimana implementasi pemenuhan hak rehabilitasi terhadap korban kekerasan seksual ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *Jo* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan teori kemanfaatan hukum. Dengan menggunakan teori kemanfaatan hukum sebagai alat untuk menganalisis penelitian ini, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *Jo* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban telah mencerminkan teori kemanfaatan dan memberikan dampak yang baik bagi korban tindak pidana kekerasan seksual. Kemudian penelitian ini juga menyimpulkan bahwa pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *Jo* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Namun peran dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban kurang efektif dan belum ideal untuk memberikan pemenuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual yang berada diluar wilayah jangkauan Kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Kata kunci: Kekerasan Seksual, Hak Korban Kekerasan Seksual, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

***THE ROLE OF WITNESS AND VICTIM PROTECTION
INSTITUTIONS IN FULFILLING THE RIGHTS OF VICTIMS
OF SEXUAL VIOLENCE IS REVIEWED FROM THE THEORY
OF LEGAL EXPEDIENCY***

Fajar Kurniawan

Master of Law

Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., LL.M.

ABSTRACT

By paying attention to the needs of victims of sexual violence that are very thorough, the purpose of this study is to find out whether Law Number 13 of 2006 Jo Law Number 31 of 2014 concerning Witness and Victim Protection Institutions has been able to fulfill the Rights of Victims of Sexual Violence in terms of legal expediency theory. In addition, what we want to know in this study is how to implement the fulfillment of rehabilitation rights for victims of sexual violence in terms of Law Number 13 of 2006 Jo Law Number 31 of 2014 and the theory of legal expediency. By using the theory of legal expediency as a tool to analyze this research, it can be concluded that Law Number 13 of 2006 Jo Law Number 31 of 2014 concerning Witness and Victim Protection Institutions has reflected the theory of expediency and has a good impact on victims of sexual violence crimes. However, the role of the Witness and Victim Protection Agency is less effective and not ideal to provide fulfillment of the rights of victims of sexual violence crimes that are outside the coverage area of the Witness and Victim Protection Agency Office.

Keywords: *Sexual Violence, Rights of Victims of Sexual Violence, Witness and Victim Protection Agencies*